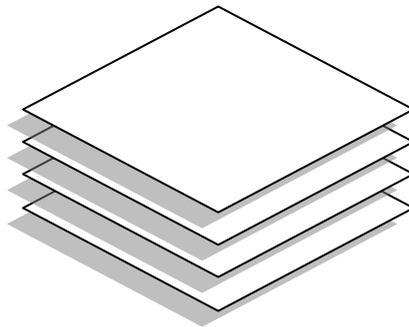




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**BAPPEDA
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2012**



Muara Teweh, Januari 2013



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*

Disamping sebagai perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, penyusunan LAKIP ini juga sebagai penilaian atas keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerahnya dalam satu tahun anggaran.

Pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah mempunyai arti yang sangat penting karena :

- a. Laporan akuntabilitas merupakan suatu media hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah nya yang berisi informasi dan data yang telah diolah.



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

- b. Laporan akuntabilitas merupakan perwujudan tertulis pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah nya kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri selaku pemberi kewenangan.
- c. Laporan akuntabilitas berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan yang telah ditetapkan untuk dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran, Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerahnya. LAKIP sebagai media akuntabilitas Pemerintah Kabupaten merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi kewenangan yang akhirnya bermuara kepada Bupati untuk selanjutnya menjadi pertanggung jawaban kepada masyarakat (publik accountability) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.
- d. Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri.

Dalam penyusunan LAKIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LAKIP ini.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2012. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2012 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2012 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran dengan kategori capaian sasaran cukup berhasil.



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Muara Teweh, 15 Januari 2013



KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BARITO UTARA,


I. H. JAINAL ABIDIN, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631014 199003 1 007



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
1. Kedudukan	3
2. Tugas Pokok	3
3. Fungsi	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	6
1. Personil	6
2. Pembiayaan	7
3. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung	7
E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP	8
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. VISI DAN MISI	10
B. TUJUAN DAN SASARAN	13
1. Tujuan	13
2. Sasaran	13
C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	14
D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	16
1. Tugas Pokok dan Fungsi	16
2. Visi	17
3. Misi	17
4. Tujuan dan Sasaran	18
5. Kebijakan-Kebijakan	18
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2012	19



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 2012	21
A.	AKUNTABILITAS KINERJA	21
B.	CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA	28
1.	Capaian Kinerja	28
2.	Analisis Kinerja	28
C.	AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
1.	Belanja Tidak Langsung	29
2.	Belanja Langsung	29
D.	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	33
BAB IV	PENUTUP	34
A.	TINJAUAN UMUM	34
B.	TINJAUAN KHUSUS	34
C.	SIMPULAN	34
D.	RENCANA TINDAK LANJUT	34



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.



B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara disingkat BAPPEDA adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, struktur organisasi Bappeda terdiri dari Kepala Bappeda dengan tingkat eselon II/b, Sekretaris dan dibantu oleh 5 (lima) Bidang yaitu :

- a) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana.
- b) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- c) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya.
- d) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, dan
- e) Bidang Penanaman Modal

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Perda Nomor : 01 tahun 2012, tugas pokok Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

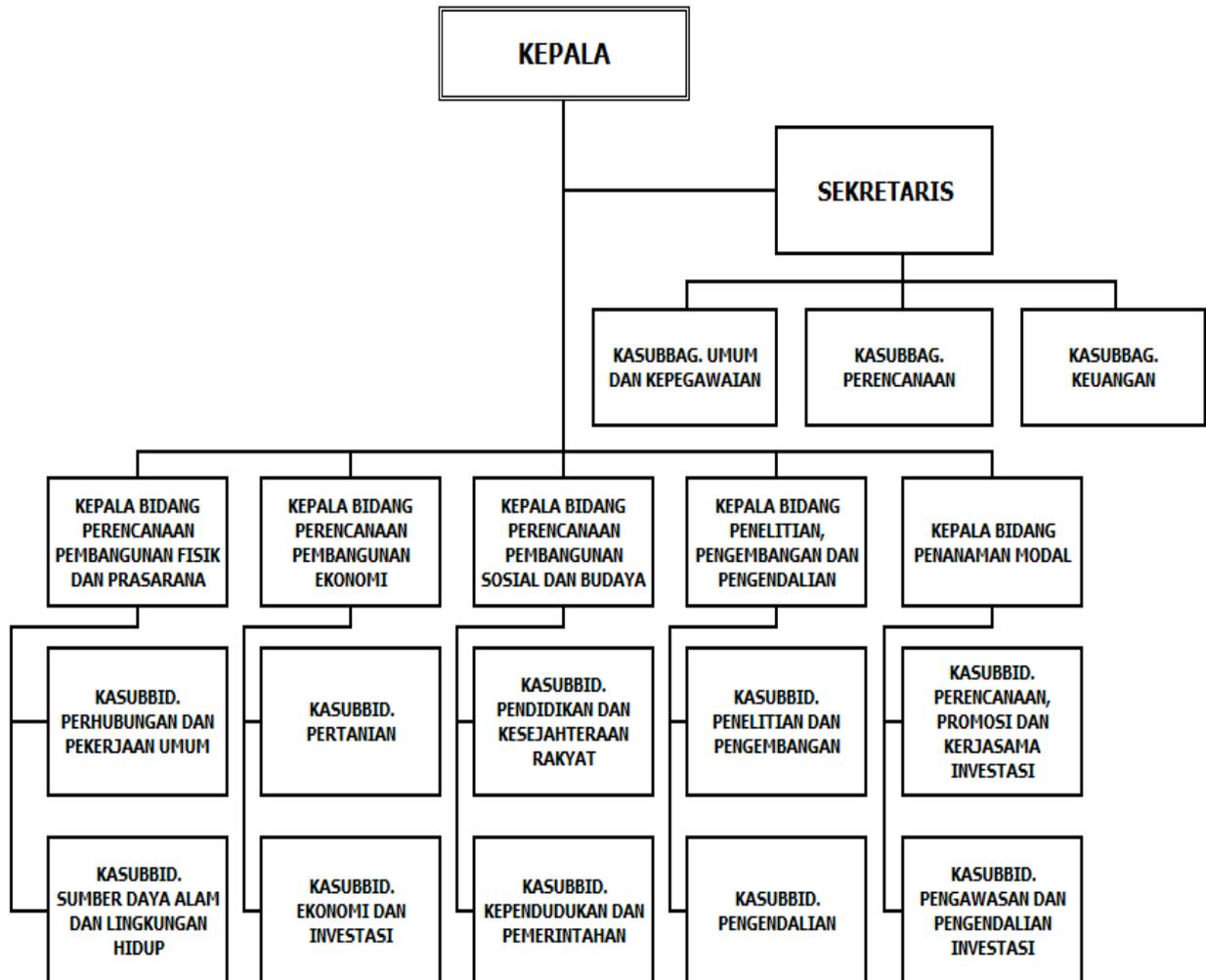
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2012, Kepala BAPPEDA dibantu oleh:

1. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag. Perencanaan; dan
 - c. Subbag. Keuangan.
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana;
 - a. Subbid. Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 - b. Subbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - a. Subbid. Pertanian;
 - b. Subbid. Ekonomi dan Investasi.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
 - a. Subbid. Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Subbid. Kependudukan dan Pemerintahan.
5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian;
 - a. Subbid. Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Subbid. Pengendalian.
6. Bidang Penanaman Modal
 - a. Subbid. Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - b. Subbid. Pengawasan dan Pengendalian Investasi.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Bappeda Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :





D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu bisa menciptakan peluang, atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu otonomi daerah, perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan serta situasi keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah sumber daya manusia aparatur, sumber dana pembangunan daerah, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan.

1. Personil

Keadaan Pegawai menurut Golongan dan Kepangkatan serta Jenjang Pendidikan (kondisi Desember 2012)

No.	Gol. Ruang	Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)								Jumlah
		S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	SLTA	SMP	SD	
1.	IV	2	3	-	1	-	-	-	-	6
2.	III	3	16	-	3	-	3	-	-	25
3.	II	-	-	-	1	-	10	-	1	12
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	19	-	5	1	13	-	1	43



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk Melaksanakan Program Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2012 yang tertuang dalam DPA Bappeda Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian (Jenis belanja)	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak langsung	4.228.144.012,-
	1.1. Belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan)	4.228.144.012,-
2.	Belanja Langsung	4.727.171.125,-
	2.1. Belanja Pegawai	656.415.000,-
	2.2. Belanja Barang dan Jasa	3.515.631.125,-
	2.3. Belanja Modal	555.125.000,-
	JUMLAH	8.955.315.137,-

3. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung

Dengan selesainya kegiatan rehab gedung kantor Bappeda Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut (3 tahap), tentunya berdampak positif terhadap kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sehingga target-target yang diharapkan pada tahun 2012 ini bisa tercapai dengan baik.

Tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai seperti komputer, laptop, printer, sarana komunikasi seperti internet juga mempengaruhi kinerja aparatur dalam hal penyiapan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen lainnya.



E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2012 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2012 sebagai sarana pertanggung jawaban Bappeda Kabupaten Barito Utara atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2012. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi dan tujuan/strategis dapat dicapai.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2012 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda Kabupaten Barito Utara bagi upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. LAKIP dapat memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta member masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan media pertanggung-jawaban yang berisi informasi capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Barito Utara tahun 2012. Capaian kinerja tahun 2012 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja tahun 2012 yang telah ditetapkan, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan instansi.

Analisis atas capaian kinerja yang tercermin dalam indikator-indikator sasaran, memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kerja (performance gap) guna perbaikan pada masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2012 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut.

Bab I – Pendahuluan,

menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja,

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012 meliputi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2009 - 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012,

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2012.

Bab IV – Penutup,

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) RPJMD 2009-2013;
- 2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2009-2013;
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2012

A. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsiten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.



Dengan batasan tersebut, Visi Bappeda Kabupaten Barito Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :

“TERSUSUNNYA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERARAH DAN REALISTIS “

Dari pernyataan visi tersebut, Bappeda Kabupaten Barito Utara berkeinginan untuk menjadi pendorong utama dalam membuat perencanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera dan bermartabat melalui pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa.

Sarana yang akan digunakan untuk mencapai visi tersebut adalah melalui pembangunan secara menyeluruh, termasuk dalam hal membangun sumberdaya yang mandiri, berdaya saing dan produktif, serta dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan menjadi 3 misi yaitu :

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan memperhatikan aspek dan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif serta bottom up dan top down.
2. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh rencana pembangunan untuk menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Misi Pertama bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku



kepentingan (*stakeholders*) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemanjapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah dan mampu mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Misi Kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa Peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, institusi perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

Misi ketiga yaitu Mewujudkan sinergitas koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah, diperlukan kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan proses pembangunan daerah secara bersama-sama instansi terkait. Dengan kegiatan ini dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk kegiatan perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.



B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi/bidang, maupun antar pusat dan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2. SASARAN

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- b. Tersusun dan tersedia data base hasil pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk dokumen.
- c. Tersusun kebijakan perencanaan pembangunan tepat waktu.
- d. Tersusun kebijakan perencanaan anggaran sebagai acuan SKPD dan kordinasi perencanaan serta motivasi yang inovatif, efektif dan efisien.
- e. Tersedianya kajian evaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan dan laporan pertanggungjawaban.



C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Pencapaian tujuan/sasaran Bappeda Kabupaten Barito Utara ditempuh dengan strategi yang terdiri dari Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5 : Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

No.	Kebijaksanaan Kepala Daerah	Cara Mencapai Tujuan		
		Kebijaksanaan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme dan kreativitas SDM 2. Menyusun Dokumen Sistem dan Mekanisme Perencanaan 3. Menyusun Dokumen Perencanaan 4. Menyusun data base perencanaan 5. Mengembangkan system database perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Program Kerjasama Pembangunan 1. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Perencanaan Sosial dan Budaya 3. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1. Pengembangan Data /Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1. Penyusunan Rancangan RKPD. 2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 3. Penyusunan KUA dan PPAS 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 3. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah 1. Penyusunan Profil Daerah 2. Penyusunan PDRB Barito Utara 3. Penyusunan Barito Utara dalam Angka



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

No.	Kebijaksanaan Kepala Daerah	Cara Mencapai Tujuan		
		Kebijaksanaan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
		6. Melaksanakan koordinasi antar komponen pembangunan dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Pengembangan Data /Informasi 2. Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Rapat koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah 2. Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se-Kalimantan 3. Promosi Potensi daerah dan peluang Investasi 4. Pembuatan leaflet, potensi dan peluang investasi 5. Data profil investasi sektor unggulan 1. Pengawasan dan Pengendalian Investasi 2. Pembinaan PMA/PMDN 3. Monitoring Realisasi kegiatan PMA/PMDN 1. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah 1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah



D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 - 2013 disusun merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Barito Utara tahun 2009 - 2013 sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara. Adapun gambaran umum Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 - 2013 dapat dijabarkan dalam Tupoksi, Visi, Misi, tujuan/sasaran dan kebijakan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok adalah menyelenggarakan tugas tertentu dibidang perencanaan pembangunan, monitoring dan pembangunan, penanaman modal serta penelitian dan statistik dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsinya adalah untuk :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, monitoring pembangunan penanaman modal serta penelitian dan statistik.
- b. Pembinaan dan pelayanan umum dibidang perencanaan pembangunan, monitoring pembangunan, penanaman modal serta penelitian dan statistik.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang perencanaan pembangunan monitoring pembangunan, penanaman modal serta penelitian dan statistik.
- d. Pembinaan urusan tata usaha badan.



BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA

2. Visi

Dalam rangka menggambarkan perwujudan terhadap keadaan yang diinginkan (dicita-citakan) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Visi Bappeda Kabupaten Barito Utara telah dirumuskan sebagai berikut :

“TERSUSUNNYA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERARAH DAN REALISTIS”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara diharapkan terarah berdasarkan akomodasi (representasi) semua pemangku kepentingan (stakeholder), berpedoman pada petunjuk/pendekatan/tatacara yang telah ditetapkan serta memperhatikan kerangka waktu dan kemampuan sumberdaya yang tersedia sehingga tersusun perencanaan yang layak dan dapat dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Utara tahun 2009-2013.

3. Misi

Misi Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan atau harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di atas, rumusan misi (mission statement) tersebut sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah dan terpadu serta tanggap (responsive) terhadap perubahan dengan memperhatikan aspek dan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top down.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kualitas kebijakan, program dan kegiatan.
3. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh rencana pembangunan untuk menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan



4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2009 – 2013 adalah :

- a. Memberikan landasan terhadap arah penyelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga landasan tersebut memberikan suatu modal kesepahaman dan kesepakatan.
- b. Memberikan arahan dan penjabaran mengenai program dan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah selama 5 (lima) tahun.
- c. Merupakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kerja

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, dapat disusun sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya landasan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang memberikan suatu modal kesepahaman dan kesepakatan.
- b. Terwujudnya penjabaran arahan mengenai program dan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah selama lima tahun.
- c. Tersedianya dokumen yang dapat dijadikan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja.

5. Kebijakan-kebijakan

Kebijakan merupakan cara untuk mencapai atau mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dimaksud adalah :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi/bidang maupun antar pusat dan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- f. Peningkatan koordinasi dan semangat kekeluargaan secara vertikal dan horizontal untuk pencapaian kinerja yang optimal.

E RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Target kinerja merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja tahun 2012 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Bappeda Kabupaten Barito Utara dapat dirujukan pada rencana kinerja ini.

Sasaran strategis tahun 2012, indikator kinerja dan target kinerja dapat diikhtisarkan sebagai berikut :



Sasaran Strategis Tahun 2012, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sasaran :			
	1. Tersedianya kualitas aparatur Perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek, Diklat Perencanaan	Orang	20
	2. Tersedianya Pedoman system perencanaan	Jumlah Perda, Perbup tentang system perencanaan pembangunan yang disusun	%	100
	3. Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	%	100
2.	Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sasaran :			
	1. Tersedianya data base perencanaan	Tingkat Ketersediaan data base perencanaan	%	100
	2. Tersedianya informasi Pembangunan	Tingkat ketersediaan informasi Pembangunan	%	100
3.	Tujuan : Meningkatnya Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sasaran :			
	1. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	a. Rata-rata pelaksanaan Rakordal Pelaksanaan Pembangunan per tahun. b. Rata-rata pelaksanaan Monitoring kegiatan Pembangunan per tahun	% %	100 100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2012

A. AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP Tahun 2012 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003. Dengan demikian dalam penyusunan ini masih banyak dijumpai kesulitan dan hambatan. Hambatan terbesar yang dihadapi adalah dalam hal penentuan indikator kinerja yang tersebar pada bidang-bidang dan sekretariat di lingkungan Bappeda Kabupaten Barito Utara. Hal ini disebabkan oleh adanya penyempurnaan Keputusan Kepala LAN dan belum disosialisasikan.

Namun demikian, hambatan yang dihadapi tidak menyurutkan langkah tetap dapat mengumpulkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten. Pengumpulan data diperoleh melalui pengisian daftar permintaan data berupa indikator kinerja yang terdiri atas rencana (target) yang ditetapkan serta realisasi tahun 2012 kepada masing-masing bidang dan Sekretariat Bappeda Kabupaten Barito Utara.

Pada bagian ini, akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan diambil.



a. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kreativitas SDM aparatur, Bappeda melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2012 Bappeda telah mengikuti sebanyak 9 kegiatan Bimtek, Diklat dan Kursus-kursus, antara lain :

- Diklat Perencanaan dan Kebijakan Perencanaan Penanaman Modal (1 orang). Kegiatan Diklat ini memberikan dampak yang positif terhadap pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah khususnya bidang penanaman modal bagi PMDN dan PMA yang tentunya akan meningkatkan arus investasi di Kabupaten Barito Utara.
- Pelatihan HAM bagi Panitia Peran HAM (1 orang)
- Diklat Analisis Beban Kerja di Bandung (2 orang)
- Diklat Bendahara Keuangan Daerah di Jakarta (1 orang)
- Diklat Penyusunan RKPD, Pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Jakarta (1 orang).

Setelah mengikuti Diklat ini tentunya dapat membantu keberhasilan Bappeda dalam menjalankan fungsinya dalam hal perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada keberhasilan dalam kegiatan penyusunan RKPD dan juga penyusunan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara.

- Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah di Muara Teweh (6 orang)
- Bimtek Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD di Jakarta (3 orang)
- Bimtek Penyusunan LAKIP, E-LAKIP serta Pendalaman Materi IKU di Palangka Raya (2 orang)

b. Dalam pelaksanaan Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, yaitu bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara. Buku PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 merupakan publikasi keadaan 3 tahun terakhir dengan tahun 2009 angka tetap dan tahun 2010 dan tahun 2011 masih merupakan angka sementara.

Pada tahun 2012 telah disusun buku PDRB sesuai rencana kebutuhan yaitu sebanyak 60 buku.



- c. Penyusunan Buku Barito Utara dalam Angka juga bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara.

Penyusunan Buku Barito Utara dalam Angka Tahun 2012 merupakan upaya dalam mengembangkan perstatistikan daerah untuk menyediakan data yang terpadu bagi keperluan di daerah ini, yang mana pada tahun 2012 ini telah tercetak sesuai rencana kebutuhan yaitu sebanyak 60 buku.

- d. Penyusunan Buku Profil Daerah tahun 2012 merupakan upaya dalam menggambarkan keadaan daerah dan potensi daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka memberikan informasi penting kepada pihak yang berkepentingan sebagai upaya untuk kemajuan daerah.

- e. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2012 merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun maksud dari pada kegiatan ini adalah untuk memantau, mengendalikan dan mengawasinya serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan tahun 2012. Buku Inventarisasi Program/Kegiatan Tahun 2012 ini memuat program/kegiatan beserta pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan pada 6 Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD-SKPD terkait.

- f. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan salah satu pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program dan kegiatan rencana pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengecek dan menilai jalannya



program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga ke kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharannya. Program dan kegiatan yang dimonitoring adalah program/kegiatan di dinas/instansi yang melaksanakan kegiatan fisik dan prasarana umum. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilaksanakan pada tiap triwulan yaitu triwulan I, II, III dan IV tahun anggaran 2012.

- g. Sebagai lanjutan dari kegiatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah yang ditanda tangani oleh 12 Kabupaten pada tahun 2010 yang lalu, maka pada tahun 2012 ini dilaksanakan kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah yang dilaksanakan di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, pada tanggal 28 Agustus 2012.
- h. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan RPJPD pada tahun 2012 bekerjasama dengan UNPAR telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal RPJP, Konsultasi Publik, Musrenbang RPJP, evaluasi Gubernur dan memasuki proses pembahasan Raperda RPJP Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 - 2025 oleh DPRD Kabupaten Barito Utara.
- i. Penyusunan Rancangan RKPD dilaksanakan dan disusun yaitu sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang memuat rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif masing-masing SKPD untuk tahun anggaran 2013. Dokumen RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Instansi di Kabupaten pada umumnya dan juga merupakan pedoman utama dalam penyusunan RAPBD tahun 2013, karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Untuk itu setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi / memadu serasikan rencana program hingga pelaksanaannya.



- j. Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahun dan diselenggarakan secara berjenjang, yaitu mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada tingkat desa/kelurahan telah dilakukan inventarisasi usulan-usulan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat pada 6 Kecamatan yang kemudian akan dibahas dan dirumuskan kembali pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan keselarasan RKPD dan Renja Desa dan Kecamatan, maka memerlukan masukan dari Desa / Kelurahan, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan.
- k. Melaksanakan Penyusunan KUA, PPAS Perubahan Tahun 2012 dan KUA, PPAS Murni Tahun 2013. Adapun tujuan penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai pedoman dan arah penyusunan APBD untuk menyusun rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Barito Utara. Masing-masing dokumen KUA dan PPAS ini akan disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif.
- KUA Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 25/KEP-DPRD/2012 / 050.13/439a/BAPP/A2 tanggal 2 Oktober 2012.
 - PPAS Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 24/KEP-DPRD/2012 / 050.13/439b/BAPP/A2 tanggal 2 Oktober 2012.
 - KUA APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2013 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 22/KEP-DPRD/2012 / 050.13/437.a/BAPP/A2 tanggal 27 September 2012.
 - PPAS APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2013 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 23/KEP-DPRD/2012 / 050.13/437.b/BAPP/A2 tanggal 27 September 2012.



- l. Dalam rangka menciptakan sinkronisasi program-program pembangunan daerah dan agar lebih terarahnya perencanaan pembangunan di berbagai bidang, maka pada tahun 2012 Bappeda melakukan koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan pusat melalui beberapa kegiatan, antara lain : kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya serta kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

- m. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) Tingkat Kabupaten Barito Utara dilaksanakan di gedung Balai Antang Muara Teweh, pada tanggal 13 Maret 2012, sebagai wahana bagi jajaran pemerintah untuk mengkoordinasikan dukungan di bidang sarana dan prasarana ekonomi sehingga rencana investasi dunia usaha yang sudah mendapat persetujuan maupun yang sedang direncanakan dapat difasilitasi untuk dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan dan sebagai bahan penyusunan perencanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Utara.

- n. Mengikuti Rapat/Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se-Kalimantan di Palangka Raya pada tanggal 23 s.d. 26 Oktober 2012 adalah untuk menyiapkan perencanaan penanaman modal yang sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah sehingga menciptakan kondisi yang menarik investor untuk berinvestasi. Selanjutnya Bappeda dalam hal ini Bidang Penanaman Modal mengikuti kegiatan Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di Jakarta pada tanggal 19 s.d. 21 November 2012.

- o. Dalam rangka mempromosikan ragam potensi, peluang investasi serta perluasan pasar bagi produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Barito Utara, maka pada tahun 2012 Bappeda telah mengikuti beberapa kegiatan Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi, antara lain sebagai berikut :
 1. Kalteng Expo Tahun 2012 di Palangka Raya, tanggal 19 s.d. 24 Mei 2012.
 2. Otonomi Expo dan Forum 2012 di Jakarta, tanggal 24 s.d. 27 Mei 2012.
 3. Harkopnas Expo Tahun 2012 di Palangka Raya, tanggal 12 s.d. 15 Juli 2012



- p. Pembuatan Booklet Potensi dan Peluang Investasi adalah sebagai upaya strategis dari promosi untuk meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Barito Utara dialokasikan dengan output sejumlah 1300 lembar.
- q. Penyusunan Buku Data Profil Investasi Sektor Unggulan sebanyak 200 buku, memuat informasi tentang kondisi ekonomi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Barito Utara. Melalui media informasi ini, diharapkan mampu menarik minat investor untuk berperan serta dalam kegiatan usaha, investasi, perdagangan, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya. Adapun faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Barito Utara yaitu Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung serta Potensi Ekonomi.
- r. Pengawasan dan Pengendalian Investasi adalah upaya yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal dan ketentuan-ketentuan tentang penanaman modal kegiatan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
- s. Pembinaan PMA/PMDN adalah upaya/kegiatan pembinaan yang dilakukan guna mencapai satu pemahaman yang sama antara aparatur pusat, daerah dan pengusaha penanaman modal tentang peraturan pelaksanaan penanaman modal dan upaya membantu menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- t. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN adalah upaya/kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan penanaman modal dan masalah-masalah yang dihadapi serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- u. Disamping itu, Bappeda Kabupaten Barito Utara juga telah berhasil menyusun Buku Catatan Saku (Data Penting Daerah) yang disusun selama 3 tahun (3 Edisi), yaitu Edisi-I (Tahun 2010), Edisi-II (Tahun 2011), dan Edisi-III (Tahun 2012), adapun tujuan dari penyusunan Buku Catatan Saku (Data Penting Daerah) ini adalah untuk membahani kelengkapan data/informasi didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda didalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.



B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA

Capaian dan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 dimulai dari pengukuran kinerja serta analisis pencapaian kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 96,23 % yang dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja program.

1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran (performance plan) diinginkan dengan realisasi kinerja sasaran (performance result) yang dicapai.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja (target) dari masing-masing indikator, memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Analisis Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2012, dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 8.955.315.137,- telah direalisasikan sebesar Rp. 5.403.620.476,- atau 60,34 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

No.	Kegiatan	Flapond/DPPA (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp.)	(%)		
1.	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan)	4.228.144.012,-	2.335.424.269,-	55,24	100	1.892.719.743,-

2. Belanja Langsung

NO.	KEGIATAN	FLAPON/DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.109.000,-	4.000.000,-	36,01	100,00	7.109.000,-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.840.000,-	46.405.357,-	42,64	100,00	62.434.643,-
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.500.000,-	19.675.000,-	95,98	100,00	825.000,-
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprsnl	3.100.000,-	1.667.400,-	53,79	100,00	1.432.600,-
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	90.300.000,-	59.700.000,-	66,11	100,00	30.600.000,-
6.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	96.985.000,-	67.675.000,-	69,78	100,00	29.310.000,-
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	73.437.000,-	58.388.440,-	79,51	100,00	15.048.560,-
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000,-	85.557.600,-	95,06	100,00	4.442.400,-
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.075.000,-	4.175.000,-	17,34	100,00	19.900.000,-



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

NO.	KEGIATAN	FLAPON/DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.462.500,-	25.798.000,-	70,75	100,00	10.664.500,-
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000,-	31.685.500,-	42,25	100,00	43.314.500,-
12.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	270.621.000,-	179.623.800,-	66,37	100,00	90.997.200,-
13.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	56.890.000,-	41.400.000,-	72,77	100,00	15.490.000,-
14.	Jasa Pihak Ketiga	3.000.000,-	0,-	0	0,00	3.000.000,-
15.	Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah	80.000.000,-	4.865.000,-	6,08	100,00	75.135.000,-
16.	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	43.680.000,-	40.020.000,-	91,62	100,00	3.660.000,-
17.	Pengadaan peralatan gedung kantor	227.318.750,-	167.654.500,-	73,75	100,00	59.664.250,-
18.	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	23.500.000,-	0,-	0	0,00	23.500.000,-
19.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.625.000,-	38.501.100,-	63,51	100,00	22.123.900,-
20.	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	91.367.250,-	68.313.900,-	74,77	100,00	23.053.350,-
21.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	21.984.000,-	3.687.000,-	16,77	100,00	18.297.000,-
22.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	13.700.000,-	5.485.000,-	40,04	100,00	8.215.000,-
23.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	4.838.360,-	4.838.360,-	100,00	100,00	0,-
24.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	356.247.450,-	342.713.150,-	96,20	100,00	13.534.300,-
25.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17.500.000,-	15.613.400,-	89,22	100,00	1.886.600,-
26.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	220.000.000,-	111.364.600,-	50,62	100,00	108.635.400,-
27.	Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,-	4.597.000,-	91,94	100,00	403.000,-
28.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.500.000,-	2.256.000,-	90,24	100,00	244.000,-
29.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.500.000,-	2.256.000,-	90,24	100,00	244.000,-



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

NO.	KEGIATAN	FLAPON/DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
30.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.500.000,-	2.256.000,-	90,24	100,00	244.000,-
31.	Penyusunan RKA-SKPD/DPA- SKPD	5.000.000,-	1.914.000,-	38,28	100,00	3.086.000,-
32.	Penyusunan Profil Daerah	175.000.000,-	80.731.000,-	46,13	100,00	94.269.000,-
33.	Penyusunan PDRB Barito Utara	126.333.000,-	58.805.000,-	46,55	100,00	67.528.000,-
34.	Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	72.637.000,-	51.050.000,-	70,28	100,00	21.587.000,-
35.	Penyusunan Barito Utara dalam Angka	176.842.600,-	64.158.000,-	36,28	100,00	112.684.600,-
36.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	43.758.400,-	30.774.000,-	70,33	100,00	12.984.400,-
37.	Penyusunan Rancangan RPJPD	300.000.000,-	188.266.700,-	62,76	100,00	111.733.300,-
38.	Penyusunan Rancangan RKPD	118.265.000,-	91.336.000,-	77,23	100,00	26.929.000,-
39.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	261.080.140,-	210.491.000,-	80,62	100,00	50.589.140,-
40.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	285.000.000,-	207.593.000,-	72,84	100,00	77.407.000,-
41.	Penyusunan KUA dan PPAS	162.209.200,-	117.006.900,-	72,13	100,00	45.202.300,-
42.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	91.933.800,-	48.352.000,-	52,59	100,00	43.581.800,-
43.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	145.673.000,-	76.687.400,-	56,24	100,00	68.985.600,-
44.	Penunangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	50.000.000,-	24.853.400,-	49,71	100,00	25.146.600,-
45.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	110.233.800,-	92.834.800,-	84,22	100,00	17.399.000,-
46.	Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah	55.507.000,-	51.737.000,-	93,21	100,00	3.770.000,-
47.	Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan	41.153.600,-	16.685.000,-	40,54	100,00	24.468.600,-
48.	Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi	75.000.000	62.631.900,-	83,51	100,00	12.368.100,-
49.	Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi	75.000.000	42.343.000,-	56,46	100,00	32.657.000,-



**BAPPEDA KABUPATEN
BARITO UTARA**

NO.	KEGIATAN	FLAPON/DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
50.	Data Profil Investasi Sektor Unggulan	53.551.000	46.428.000,-	86,70	100,00	7.123.000,-
51.	Pengawasan dan Pengendalian Investasi	95.000.000	33.532.000,-	35,30	100,00	61.468.000,-
52.	Pembinaan PMA / PMDN	45.453.000	15.983.000,-	35,16	100,00	29.470.000,-
53.	Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN	28.960.275	13.831.000,-	47,76	100,00	15.129.275,-
J U M L A H		4.727.171.125	3.068.196.207,-	64,91	96,23	1.658.974.918



D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun anggaran 2012 Bappeda Kabupaten Barito Utara melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam DPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana pada DPPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang berjumlah 53 buah kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga dan kegiatan Pembangunan Taman dan Halaman Kantor sehingga tidak dapat terealisasi secara optimal atau terealisasi 0 %, yaitu :

Permasalahan dan Pemecahan Masalah

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Masalah	Pemecahan Masalah
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Jasa pengumuman lelang)	3.000.000,-	0	Untuk proses lelang dan pengumuman lelang dipusatkan pada kegiatan LPSE pada Bagian Humas Setda Kab. Barut, sehingga proses pelelangan pada Bappeda dibebankan pada kegiatan LPSE dan anggaran yang tersedia pada kegiatan tersebut tidak digunakan.	Untuk tahun 2013 tidak dianggarkan lagi dan dipindahkan ke kegiatan lain.
2.	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	23.500.000,-	0	Minimnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Perubahan APBD dan DPA Perubahan baru selesai pada bulan Desember	Dalam pengusulan anggaran perubahan akan lebih memperhitungkan waktu yang ada disamping ketersediaan dana.



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappeda Kabupaten Barito Utara.

Bappeda Kabupaten Barito Utara telah berupaya secarta optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

B. TINJAUAN KHUSUS

Walaupun pelaksanaan program/kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dapat dilaksanakan

C. SIMPULAN

Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahun anggaran 2012 dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum berhasil diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (Benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kedepannya Bappeda Kabupaten Barito Utara akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TAHUN : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersedianya kualitas aparatur Perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek, Diklat Perencanaan	20 orang
Tersedianya data base perencanaan	Tingkat Ketersediaan data base perencanaan	100 %
Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	a. Rata-rata pelaksanaan rakordal Pelaksanaan Pembangunan per tahun.	100 %
	b. Rata-rata pelaksanaan Monitoring kegiatan Pembangunan per tahun	100 %
Tersedianya Pedoman system perencanaan	Jumlah Perda, Perbup tentang system perencanaan pembangunan yang disusun	100 %
Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	100 %
Tersedianya informasi Pembangunan	Tingkat ketersediaan informasi Pembangunan	100 %

PENGUKURAN KINERJA

NAMA OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya kualitas aparatur Perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek, Diklat Perencanaan	20 orang	17 orang	85 %
Tersedianya data base perencanaan	Tingkat Ketersediaan data base perencanaan	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	a. Rata-rata pelaksanaan rakordal Pelaksanaan Pembangunan per tahun.	100 %	100 %	100 %
	b. Rata-rata pelaksanaan Monitoring kegiatan Pembangunan per tahun	100 %	100 %	100 %
Tersedianya Pedoman system perencanaan	Jumlah Perda, Perbup tentang system perencanaan pembangunan yang disusun	100 %	100 %	100 %
Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	100 %	100 %	100 %
Tersedianya informasi Pembangunan	Tingkat ketersediaan informasi Pembangunan	100 %	100 %	100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 2.808.590.815,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 1.737.474.700,-

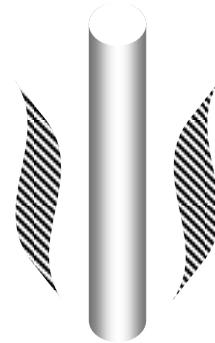
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
Tahun 2012

INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya kualitas aparatur Perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek, Diklat Perencanaan	20 orang	17 orang	85 %	
Tersedianya data base perencanaan	Tingkat Ketersediaan data base perencanaan	100 %	100 %	100 %	
Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	a. Rata-rata pelaksanaan rakordal Pelaksanaan Pembangunan per tahun.	100 %	100 %	100 %	
	b. Rata-rata pelaksanaan Monitoring kegiatan Pembangunan per tahun	100 %	100 %	100 %	
Tersedianya Pedoman system perencanaan	Jumlah Perda, Perbup tentang system perencanaan pembangunan yang disusun	100 %	100 %	100 %	
Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	100 %	100 %	100 %	
Tersedianya informasi Pembangunan	Tingkat ketersediaan informasi Pembangunan	100 %	100 %	100 %	



**PENETAPAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013**



**MUARA TEWEH
2013**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. A. Yani Nomor 186 Telepon (0519) 21130, Faximile (0519) 21611 Muara Teweh – 73811

**PENETAPAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Jainal Abidin, MAP**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Utara

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM**
Jabatan : Bupati Barito Utara

Selaku atasan langsung pihak kesatu

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, 15 Januari 2013

Pihak Kedua :
Bupati Barito Utara,

Pihak Kesatu :
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Barito Utara,

Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM

Ir. H. Jainal Abidin, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631014 199003 1 007

PENETAPAN KINERJA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun : 2013

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya kualitas aparatur Perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek, Diklat Perencanaan	20 orang	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	210.000.000,-
Tersedianya data base perencanaan	- Tersusunnya buku PDRB Barito Utara dan tercapainya koordinasi regional PDRB	50 Buku, 1 Kali	Program : Pengembangan Data/Informasi Kegiatan : Penyusunan PDRB Barito Utara	368.833.000,-
	- Tersusunnya Buku IPM Barito Utara	100 Buku	Program : Pengembangan Data/Informasi Kegiatan : Penyusunan Buku Indek Pembangunan Manusia (IPM) Barito Utara	70.000.000,-
	- Tersusunnya Buku Barito Utara dalam Angka	100 Buku	Program : Pengembangan Data/Informasi Kegiatan : Penyusunan Barito Utara dalam Angka	117.500.000,-
Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	- Tersusunnya Buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2013 - Tersusunnya Buku Laporan Triwulan Tahun 2013	60 Buku 60 Buku	Program : Pengembangan Data/Informasi Kegiatan : Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	64.692.000,-
	- Tersusunnya Buku Hasil Monitoring - Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan	100 Buku 100 Buku	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	265.600.000,-

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya Pedoman system perencanaan	Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah (12 Kabupaten, 3 Provinsi)	1 Dokumen Kerjasama	Program : Kerjasama Pembangunan Daerah Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	343.758.400,-
Tersedianya Dokumen Perencanaan	- Tersusunnya Dokumen RPJMD	200 Buku	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan rancangan RPJMD	300.000.000,-
	- Tersusunnya Dokumen RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013	100 Buku	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Rancangan RKPD	118.265.000,-
	- Tersusunnya Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan	50 Eksp	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang RKPD	284.570.400,-
	- Tersusunnya Dokumen hasil Forum SKPD	50 Eksp		
	- Tersusunnya Dokumen hasil Musrenbang Kabupaten	50 Eksp		
	- Tersusunnya KUA Perubahan 2013 - Tersusunnya PPAS Perubahan 2013 - Tersusunnya KUA Murni Thn 2014 - Tersusunnya PPAS Murni Thn 2014	100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS	162.209.200,-
	- Terciptanya sinkronisasi antara Renja dan Renstra SKPD	100 %	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra SKPD	130.101.900,-
	- Tersusunnya RPJMD yang terarah transparan dan realistis	100 %	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Evaluasi RPJMD	150.000.000,-
Terakomodirnya usulan program dan kegiatan bidang ekonomi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	92.796.300,-	

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terakomodirnya usulan program dan kegiatan bidang sosial dan budaya pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Program : Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	140.673.000,-
	Terlaksananya program PNPM yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	100 %	Program : Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan : Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	45.000.000,-
	Terakomodirnya usulan program dan kegiatan bidang prasarana wilayah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	106.285.386,-
Tersedianya informasi Pembangunan	Tersedianya data bahan penyusunan perencanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Utara	20 Buku	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah	75.507.000,-
	Terwujudnya keikutsertaan pada konsolidasi perencanaan penanaman modal tingkat Regional dan Nasional	2 kali	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan	21.153.600,-
	Terlaksananya kegiatan Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi	3 kali	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi	75.000.000,-
	Tersusunnya Buku Data Profil Investasi Sektor Unggulan	200 Buku	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : Data Profil Investasi Sektor Unggulan	53.551.000,-

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian investasi	3 Kali	Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Investasi	75.000.000,-
	Terciptanya pemahaman yang sama antara aparatur pusat, daerah dan pengusaha baik PMA atau PMDN tentang peraturan pelaksanaan penanaman modal di Daerah	80 %	Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : Pembinaan PMA / PMDN	45.453.000,-
	Tersedianya data perkembangan pelaksanaan kegiatan PMA dan PMDN	75 %	Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN	28.960.275,-

Jumlah Anggaran :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp. 210.000.000,-
Program Pengembangan Data/Informasi	: Rp. 621.025.000,-
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	: Rp. 225.211.600,-
Program Kerjasama Pembangunan Daerah	: Rp. 343.758.400,-
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	: Rp. 149.413.275,-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	: Rp. 1.410.746.500,-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	: Rp. 92.796.300,-
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	: Rp. 185.673.000,-
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	: Rp. 106.285.386,-

Muara Teweh, 15 Januari 2013

Bupati Barito Utara,

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Barito Utara,

Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM

Ir. H. Jainal Abidin, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631014 199003 1 007